

# Bali Kandarupa: Cerminan Dinamika Cipta Lintas Masa

Ni Wayan Idayati

Program Studi Tata Kelola Seni, Program Magister, Fakultas Pascasarjana  
Institut Seni Indonesia Denpasar

[kumbangsepatu@gmail.com](mailto:kumbangsepatu@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk merunut kembali jejak historis seturut dinamika cipta masyarakat seni rupa Bali yang lintas masa dalam beberapa peristiwa kunci, sekaligus menimbang relevansi kehadiran kebijakan regulasi PERDA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dalam praktik kesenian di Bali, diantaranya pameran kolosal berkala Bali Kandarupa. Penelitian ini menggunakan metode sejarah heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, dengan pendekatan sejarah sosial yang diakronis. Sejumlah peristiwa kunci yang dirujuk, antara lain; terbentuknya organisasi Pita Maha tahun 1936 sebagai cerminan gerakan sosial pada masa itu; Pesta Kesenian Bali (PKB) pertama tahun 1979 sebagai visi kebudayaan Gubernur pada masa itu, yakni Ida Bagus Mantra; gerakan “Mendobrak Hegemoni” sebagai salah satu bentuk kontra atau protes terhadap PKB; peristiwa seni rupa pasca Bom Bali I & II yang menandakan upaya masyarakat seni rupa untuk bangkit; kelahiran organisasi Bali Art Society (BAS) sebagai salah satu bentuk aksi advokasi untuk kebijakan seni budaya di Bali; kemudian ditetapkan regulasi berupa PERDA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; dan kehadiran Pameran Bali Kandarupa sebagai salah satu manifestasi PERDA Nomor 4 Tahun 2020. Melalui kajian ini dapat dirumuskan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang berperan dalam dinamika cipta seni rupa Bali yang lintas masa; 1) peristiwa, menunjuk pada ruang dan faktor kesadaran atau kehendak pelaku sejarah; 2) momentum, merujuk pada waktu yang dikehendaki sejarah; dan 3) sosok yang memiliki kesadaran sejarah, kemudian mengakselerasikan peristiwa dan momentum tersebut menjadi sebuah gerakan.

*Kata Kunci: Bali Kandarupa, momentum, kebijakan seni, determinasi*

This study aimed to review the historical trace throughout the dynamics of creativity of the Bali Art Society across time within several key events, as well as to determine relevance of the existence of policy and regulation of REGIONAL REGULATION/PERDA Number 4 of 2020 on Enforcement and Development of Balinese Culture in the practice of Balinese art, among others the periodic colossal exhibition of Bali Kandarupa. This study used heuristical, critical, interpretive, and historiographical history methods with an approach to diachronic social history. Several key events as a reference include the establishment of an organization called Pita Maha in 1936 as a reflection of the social movement at that time; the first Bali Art Festival (PKB) in 1979 as a cultural vision of the Governor at that time, namely Ida Bagus Mantra; the movement of “Breaking Hegemony” as a contra or protest against PKB; fine arts events after Bali Bombing I & II signifying the efforts of art society to rise; the establishment of Bali Art Society (BAS) organization as one of the advocacy actions for the policy of Balinese cultural arts; then the issuance of regulations including REGIONAL REGULATION/PERDA Number 4 of 2020 on the Enforcement and Development of Balinese Culture; and the presence of Bali Kandarupa Exhibition as one of the manifestations of PERDA Number 4 of 2020. Through this study, it is defined that at least 3 (three) elements play key roles in the dynamics of Bali art creativity across time: 1) an event, referring to the space and factor of awareness or will of historical actors; 2) a momentum, referring to the time the history demands; and 3) a figure with historical awareness, then accelerating such event and momentum as a movement.

*Keywords: Bali Kandarupa, momentum, arts policy, determination*

## PENDAHULUAN

Sebagai bagian integral dari Pesta Kesenian Bali (PKB), pameran seni rupa Bali Kandarupa telah diselenggarakan secara konsisten setiap tahun sejak 2021. Program yang termaktub dalam Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali ini sepenuhnya didedikasikan untuk memberi ruang apresiasi bagi seni rupa klasik, tradisi, berikut capaian kreativitas turunannya. Sedini awal digagas, Bali Kandarupa telah mengusung *tagline* Imaji, Memori, Jati Diri. Konsep ini mencerminkan keberadaan seni rupa klasik maupun tradisional di Bali yang kian tumbuh dinamis dengan kreativitas baru yang tetap berakar pada memori kultural agraris, imaji klasik, dan warisan teknik mumpuni sebagai penegas jati diri seni rupa Bali ([Adnyana dkk., 2022, 2023](#)).

Dari tahun ke tahun penyelenggaraannya, Bali Kandarupa menunjukkan adanya upaya menjaga kualitas karya-karya yang ditampilkan secara berkelanjutan, melalui skema kurasi yang ketat yakni Undangan Seniman dan Undangan Terbuka. Undangan Seniman ditujukan bagi mereka yang terbukti telah memiliki dedikasi dan reputasi, serta capaian cipta yang mumpuni. Sedangkan Undangan Terbuka (*Open Call*) terbuka bagi seniman lintas generasi yang berdomisili di Bali dan menekuni langgam seni rupa klasik/tradisi Bali. Sejatinya, pameran kolosal serangkaian PKB ini telah dirancang untuk dimulai pada tahun 2020, namun tertunda karena pandemi Covid-19 dan baru digelar untuk kali pertama pada tahun 2021 ([Adnyana dkk., 2021](#)).

Partisipan atau seniman peserta pameran berasal dari berbagai aliran/genre/komunitas/wilayah cipta se-Bali serta mencerminkan keragaman estetik, stilistik, serta gaya; semisal Kamasan, Batuan, Baung-Sayan, Keliki Kawan, Kutuh, Tegallalang, Payangan, Sayan, Peliatan, Padangtegal, Pengosekan, Tebesaya, Ubud, Blahbatuh, Tampaksiring, Sukawati, Mas, Nyuhkuning, Karangasem, Denpasar, Tihingan-Klungkung, Mengwi-Badung, hingga Nagasepaha ([Adnyana dkk., 2024](#)). Karya-karya yang dihadirkan berupa dua dimensi (lukisan dan prasi) serta tiga dimensi (patung dan topeng). Dalam catatan penyelenggaraannya, Bali Kandarupa tahun 2024 bahkan melibatkan hingga lebih dari 30-an komunitas/lokus kreatif se-Bali.

Sebagaimana ditulis dalam tulisan kuratorial Bali Kandarupa 2021, kehadiran pameran ini sesungguhnya tidak terlepas dari cita-cita bersama para perupa Bali, termasuk pelukis, agar karya seni rupa Bali mendapatkan ruang pemanggungan yang lebih representatif pada perhelatan PKB. Impian dan cita-cita itupun telah berkali dilontarkan pada berbagai ajang diskusi terbuka, forum, termasuk secara langsung kepada pemangku kepentingan dan penyelenggara PKB.

Meskipun sejak penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali (PKB) kali pertama pada tahun 1979, seni rupa sesungguhnya telah menjadi bagian dari rangkaian perhelatan seni budaya yang digagas oleh Gubernur Bali Prof. Dr. Ida Bagus Mantra, namun dalam perjalanannya hingga tahun 2019, perhelatan ini belum sepenuhnya dapat mencerminkan potensi seni rupa klasik dan tradisi Bali secara holistik. Terlebih selama ini pameran seni rupa pada ajang PKB kerap dibaurkan dengan pameran industri dan kerajinan sehingga tidak secara khusus memberikan apresiasi atas capaian karya-karya maestro seni rupa mumpuni Bali.

Padahal, berdasarkan arsip *Katalog Pameran Pesta Kesenian Bali 1979*, setidaknya ada lebih dari 200 karya lukisan, patung, dan topeng yang dipamerkan Werdhi Budaya, 20 Juni-23 Agustus 1979. Pada masa itu, boleh dikata dinamika kreativitas para perupa Bali menunjukkan capaian yang mumpuni. Banyak para pelukis

dan pematung tersebut merupakan para maestro yang merupakan bagian dari gerakan Pita Maha dan generasi setelahnya, diantaranya I Made Jata (Batuan), Ida Bagus Wija (Batuan), A.A. Gede Sobrat (Padangtegal), A.A. Gede Meregeg (Padangtegal), A.A. Raka Turas (Padangtegal), A.A. Raka Puja (Padangtegal), Dewa Nyoman Batuan (Pengosekan), I Wayan Turun (Tebesaya), I Ketut Soki (Penestanan), Ida Bagus Nyana (Mas), Ida Bagus Tilem (Mas), Cok. Oka Tublen (Singapadu), Wayan Muja (Singapadu), Mangku Mura (Kamasan), Nyoman Mandra (Kamasan), Ketut Regig (Sanur), dan lain-lain ([Pesta Kesenian Bali, 1979](#)).

Komitmen untuk menjadikan PKB sebagai ajang berkala tahunan kemudian tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 1986. Hal mana menimbang bahwa di samping sebagai wadah pelestarian budaya Bali, keberadaan PKB sekaligus memelihara aspek kontinuitas seni itu sendiri ([Pandjaja, 1997](#)).

Nyoman Darma Putra, dalam artikelnya di Bali Post, 13 Juli 1994 berjudul “Pesta Kesenian Bali Seribu Tahun Lagi”, serta disinggung kembali dalam bukunya “Bali dalam Kuasa Politik” yang terbit tahun 2008, mengungkapkan antara lain, bahwa PKB dirasa tidak memiliki *curatorship* (proses seleksi kesenian) yang mantap dalam memilih kelompok kesenian yang boleh atau pantas tampil di PKB. Terlepas dari segala dukungan maupun kontra di seputarnya, PKB tak dipungkiri telah menjadi fakta kultural kebudayaan Bali menjelang akhir abad ke-20. Maka, menurut Darma Putra, penting dipikirkan agar Bali memiliki dokumentasi PKB yang lengkap sehingga seribu tahun mendatang arsip itu bisa menjadi rujukan penting tentang dinamika kultural masyarakat Bali yang tecermin pada PKB ([Putra, 1994, 2008](#)).

Di sisi lain, Ngurah Suryawan, antropolog dan pengamat tentang Bali, melihat kehadiran PKB hanya sebagai mesin dalam rutinitas kebudayaan Bali dan tidak mampu membangun kritik ([Suryawan, 2019, 2020](#)). Senada dengan itu, Michel Picard juga berpendapat bahwa “kebudayaan Bali”, baik berupa pertunjukan maupun seni rupa, yang selama ini dihadirkan pada PKB adalah hasil rekayasa pemerintah, semata untuk mengembangkan pariwisata ([Picard, 2006](#)).

Dari kacamata berbeda, wartawan I Nyoman Wija, dalam penelitiannya yang mendalam tentang PKB dan media massa, mengurai sejumlah persoalan yang mengemuka pada even seni tahunan ini. Termasuk munculnya budaya premanisme yang dianggap sebagai dampak hegemoni negara (pemerintahan) atas kebudayaan melalui kebijakan PKB selama ini ([Wija, 2013](#)).

Memang harus diakui bahwa dinamika cipta dan ekosistem kesenian di Indonesia masih diliputi problematika yang terbilang kompleks. Bukan saja menyangkut persoalan di studio personal, hak-hak seniman, dan kebebasan berkesenian, namun juga urgensi kehadiran ruang apresiasi yang ideal dan representatif, serta bagaimana mendukung keberlanjutan ekosistem seni. Tidak sedikit para pelaku seni mengeluhkan kurangnya perhatian dari pemerintah, tiadanya balai budaya atau panggung pertunjukan yang memadai, juga belum terfasilitasinya secara optimal ajang seni budaya yang mengakomodir ragam presentasi seni seluas-luasnya. Bahkan, mungkin saja sebuah festival atau perhelatan seni justru mendapatkan resistensi dari berbagai pihak, termasuk seniman, karena dianggap semata ajang menghabiskan anggaran pemerintah tanpa adanya keberpihakan yang sungguh kepada seniman dan visi kebudayaan.

Pada tahun 2007, Wayan Kun Adnyana menerbitkan tulisan kritik di Bali Post bertajuk “Jalan Letih Seni Rupa PKB”, terangkum dalam buku kumpulan esai seni rupa *Nalar Rupa Perupa*. Ia menyoroti pameran seni rupa seolah hanya menjadi

sisipan belaka pada ajang PKB yang lebih didominasi pergelaran dan aneka perlombaan. Padahal sebagai peristiwa budaya, PKB memiliki ranah multifaset dalam berbagai ekspresi budaya, terutama kesenian, yang seyogianya berdiri seimbang. Tentu saja, sebagaimana diungkapkan Adnyana, dinamika cipta, proses berkesenian dan capaian para seniman Bali ini tetap akan berlanjut di ruang-ruang komunal lain, meskipun di luar ajang PKB. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat seni rupa Bali yang tetap menaruh pengharapan dan menyerukan cita-cita bersama untuk memiliki ruang apresiasi yang lebih baik dan memadai, serta even berkala yang terkelola dengan manajemen profesional ([Adnyana, 2007a](#)).

Maka, untuk mewujudkan ruang apresiasi yang lebih representatif bagi seni rupa, diperlukan bukan hanya tata kelola yang baik dan profesional, tetapi juga kebijakan publik yang berpihak kepada para seniman. Diperlukan dukungan berupa kebijakan di tingkat suprastruktur yang berpihak kepada kebudayaan, berikut regulasi yang melindungi hak-hak seniman dan memastikan keberlanjutan ekosistem seni rupa Bali.

Kini di Bali terdapat dua wahana atau ajang untuk pembinaan seni, yakni Pesta Kesenian Bali (PKB) dan Festival Seni Bali Jani (FSBJ). Ini sebagaimana diungkapkan Gubernur Bali 2018-2013 Wayan Koster, sewaktu membuka helatan perdana Festival Seni Bali Jani (FSBJ) tahun 2019 lalu. Lebih lanjut, keberadaan PKB dan FSBJ telah diatur dalam PERDA Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

Kajian ini bukan saja untuk menimbang relevansi kehadiran kebijakan regulasi PERDA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dalam praktik kesenian yang berlangsung di Bali, diantaranya pameran kolosal berkala Bali Kandarupa. Tetapi juga merunut kembali jejak historis seturut dinamika cipta masyarakat seni rupa Bali yang lintas masa dalam beberapa peristiwa kunci.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan sejarah sosial untuk menganalisis dan menjabarkan dinamika cipta masyarakat seni rupa Bali melalui sejumlah peristiwa kunci. Peristiwa-peristiwa kunci yang mengemuka sebagai kepingan-kepingan sejarah coba dibaca secara menyeluruh guna menemukan benang merah dari bingkai peristiwa yang lebih besar, yakni kehadiran sebuah regulasi yang menandakan lahirnya kebijakan yang mencoba berpihak kepada seniman dan kebudayaan.

Hobsbawm mengungkapkan bahwa sejarah sosial (*societal history*) memerlukan usaha untuk membuat kerangka utuh mengenai masyarakat, dengan kata lain yang total atau global, sejarah masyarakat secara keseluruhan ([Kuntowijoyo, 2003](#)). Untuk itu pula, maka setiap penulisan sejarah memerlukan sebuah model untuk memberikan inspirasi heuristik dalam tahapan pencarian dan pengumpulan bahan, serta penyusunannya.

Model sejarah yang digunakan dalam kajian ini yaitu diakronis yang bersifat lebih dinamis, menunjukkan bagaimana evolusi sebuah bentuk budaya terjadi dan menepikan konsep waktu nol atau budaya yang dianggap statis. Namun demikian, dalam konteks sejarah sosial, analisis dan penulisan sesungguhnya merupakan gabungan dari sikronis. Mengutip Galtung, hal mana ini mengingat bahwa ilmu sosial bersifat sinkronis, yaitu meneliti gejala-gejala yang meluas dalam ruang, tetapi dalam waktu yang terbatas ([Kuntowijoyo, 2008, hal. 5](#)).

Adapun tahapan metode penelitian sejarah menurut Louis Gottschalk terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, dengan tujuan merekonstruksi masa lalu ([Komang Sudirga, Hendra Santosa, 2015](#)). Menimbang bahwa bahasan ini akan merujuk kilas balik pada rentang waktu yang cukup jauh, yakni ke era lahirnya Gerakan Sosial Pita Maha tahun 1936, maka kajian tidak disusun berdasarkan periodisasi waktu tertentu, melainkan diwakili sejumlah peristiwa kunci pada momentum atau periode waktu terpilih.

Pemilihan peristiwa-peristiwa kunci tersebut didasarkan pada data-data dan fakta peristiwa seni rupa di Bali yang terjadi pada periode dan momentum waktu yang terbilang cukup krusial, antara lain; terbentuknya organisasi Pita Maha tahun 1936 sebagai cerminan gerakan sosial pada masa itu; Pesta Kesenian Bali (PKB) pertama tahun 1979 sebagai visi kebudayaan Gubernur pada masa itu, yakni Ida Bagus Mantra; gerakan “Mendobrak Hegemoni” sebagai salah satu bentuk kontra atau protes terhadap PKB; peristiwa seni rupa pasca Bom Bali I & II yang menandakan upaya masyarakat seni rupa untuk bangkit; kelahiran organisasi Bali Art Society (BAS) sebagai salah satu bentuk aksi advokasi untuk kebijakan seni budaya di Bali; kemudian ditetapkannya regulasi berupa PERDA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali; dan kehadiran Pameran Bali Kandarupa sebagai salah satu manifestasi PERDA Nomor 4 Tahun 2020.

Pada tahap pertama, heuristik, yaitu mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan keberadaan PERDA Nomor 4 Tahun 2020, Pameran Bali Kandarupa, juga tulisan-tulisan, pemberitaan media, serta buku-buku yang mengulas atau terkait mengenai sejumlah peristiwa kunci di atas. Data-data dan informasi yang telah terkumpul juga dikelompokkan berdasarkan sumber rujukan serta pemilahan peristiwanya.

Sedangkan pada tahap kedua, yakni kritik atau pengujian, dilakukan sanding-banding data, fakta, dan informasi dari berbagai sumber yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dipilah kembali bagian-bagian yang relevan dengan konteks penelusuran. Adapun data-data yang diperoleh sebagian besar merupakan arsip atau dokumentasi primer berupa arsip katalog peristiwa pada saat itu, tulisan-tulisan dari tokoh yang bersangkutan atau terlibat di dalam peristiwa, pemberitaan media (kliping koran), juga melalui pengamatan langsung dalam peristiwa pameran Bali Kandarupa (observasi partisipatoris). Informasi yang berasal dari arsip katalog, kliping koran, serta tulisan dari tokoh yang terlibat langsung dalam peristiwa tidak lagi diuji keasliannya, tetapi untuk data dan informasi menyangkut kesejarahan PKB dan posisi seni rupa Bali dalam ajang PKB dilakukan upaya penelusuran pustaka yang lebih mendalam guna memperoleh keterangan pembandingan.

Adapun tahap ketiga, interpretasi, yakni penafsiran terhadap fakta dan sumber sejarah. Garraghan mengemukakan bahwa interpretasi dilakukan dalam dua bentuk yaitu analisis atau menguraikan dan sintesis atau menyatukan ([Komang Sudirga, Hendra Santosa, 2015](#)). Pada proses interpretasi inilah seringkali terbuka kemungkinan subyektivitas seorang penulis atau peneliti sejarah. Sebagaimana diungkapkan Marc Bloch, meskipun Leopold von Ranke (Jerman) mengeluarkan diktum bahwa seorang sejarawan hendaknya menulis sebagaimana sebenarnya terjadi (*wie es eigentlich gewesen*), yang berarti sejarawan harus tunduk kepada fakta, memiliki integritas, dan objektif (imparsial), namun tetap saja soal imparsialitas atau tidak memihak menimbulkan perdebatan tersendiri, sebab sejarah sebagai reproduksi (rekonstruksi) sejarah tidak lepas dari analisis ([Kuntowijoyo, 2008, hal. 3](#)).

Tahap terakhir yakni historiografi atau penulisan sejarah yang mencoba membaca keseluruhan peristiwa-peristiwa kunci yang diungkapkan dalam kajian ini sebagai sebuah gejala dalam dinamika cipta masyarakat seni rupa Bali. Konteks cipta dimaksud bukan sebatas proses kreatif personal seorang seniman di studionya masing-masing, namun menunjuk pula kepada proses yang berlangsung secara berkelompok di ruang-ruang komunal. Aksi kolektif (*collective action*) masyarakat seni rupa Bali ini di satu sisi menandakan jiwa zaman (*Zeitgeist*) yang menggerakkan setiap peristiwa yang terjadi; sekaligus pada saat yang sama juga merupakan cerminan sebuah determinasi sejarah. Determinasi ([Lailatusyarifah, 2021](#)) merujuk pada prinsip yang memiliki poin sentral pada hukum sebab-akibat. Pada masa Helenistik, pembicaraan seputar kebebasan dan determinasi terpusat pada bagaimana determinasi takdir dapat mengendalikan tindakan dan kehidupan manusia.

Telaah yang melibatkan konsep determinasi ini sesungguhnya juga berangkat dari kesadaran bahwa kehadiran setiap peristiwa dan pelaku sejarah sejatinya tidak pernah berdiri sendiri, melainkan selalu memiliki pertautan dengan berbagai unsur dan peristiwa lain di luar “dirinya”, baik di masa kini, masa lampau, maupun mendatang.

## **ANALISIS DAN INTEPRETASI DATA**

### **Dinamika cipta: aksi kolektif masyarakat seni rupa Bali**

Bila kita merunut jejak gerakan sosial seni rupa di Bali, kiranya harus diuraikan sedini hadirnya Kelompok Pita Maha tahun 1936, diinisiasi oleh Tjokorda Gde Raka, Tjokorda Gde Agung Sukawati, Walter Spies, Rudolf Bonnet dan Gusti Nyoman Lempad. Dalam disertasinya yang kemudian dibukukan menjadi “Pita Maha: Gerakan Seni Lukis Bali 1930-an”, Wayan Kun Adnyana menguraikan alur praktik seni lukis Bali 1930-an dengan melibatkan berbagai agen (patronase puri, pelukis senior Ubud, pelukis remaja, dua pelukis Barat—Bonnet, Spies) dan terbangunnya model interaksi berbagai komponen penyangga, memunculkan kesadaran bersama untuk mengorganisasi keseluruhan praktik seni tersebut demi tujuan-tujuan yang lebih besar dan ideologi; kemudian dirumuskan sebagai sebuah gerakan sosial seni ([Adnyana, 2018](#)).

Ditegaskan kembali oleh Kun Adnyana dalam wawancara di KOMPAS, 27 Februari 2022, kajian tentang Pita Maha sesungguhnya membuktikan tidaklah sepenuhnya benar anggapan bahwa Pita Maha benar-benar mengabdikan pada kepentingan modalitas ekonomi yang dimotori oleh maecenas Tjokorda Gde Raka Sukawati, Rudolf Bonnet, dan Walter Spies ([Arcana, 2022](#)). Meskipun pada dasarnya disertasi tersebut menolak anggapan Ngurah Suryawan bahwa Pita Maha semata kolonisasi seni dan budaya serta operasi kekuasaan, namun dialektika dan pergulatan wacana yang berkembang sesungguhnya senantiasa bertaut satu sama lain.

Layak dicatat gerakan “Mendobrak Hegemoni” yang dilakukan Kamasra STSTI/ISI Denpasar, 23-25 Februari 2001—ditulis dengan sangat panjang dan rinci oleh Ngurah Suryawan—sebagai bentuk protes terhadap kelompok-kelompok yang dianggap hegemonik, antara lain seniman Sanggar Dewata Indonesia (SDI), pemilik museum dan galeri, juga kurator dan penulis seni. Puncak ketegangan adalah pada pameran Pesta Kapitalisme Bali Juni 2001 yang ditujukan untuk mengkritik PKB yang dianggap “membosankan” ([Suryawan, 2001, 2009](#)).

Periode berikutnya barangkali dapat dibaca sebagai bagian dari upaya masyarakat seni rupa Bali untuk bangkit pemulihan Bali dari dampak peristiwa Bom Bali I (2002) dan Bom Bali II (2005). Hadir even Bali Biennale dan Pra-Bali Biennale

tahun 2005, yang dideklarasikan atas prakarsa Yayasan Seni Citrakara dan melibatkan komponen seni Bali, seperti Putu Wirata Dwikora, Nyoman Nuarta, Anak Agung Gde Rai, Wayan Sika, Wayan Kun Adnyana, juga budayawan Prancis yang lama menetap di Bali Jean Couteau, dan lain-lain. Meskipun diniatkan sebagai perayaan keragaman dan visi menjadikan Bali sebagai ruang budaya yang terbuka ([Dwikora, 2005, 2020](#)), tetap saja even ini tidak lepas dari perdebatan. Mulai dari pemertanyaan mengenai konstruksi politik kebudayaan dalam Bali Biennale 2005 oleh Ari Dwipayana hingga lahirnya gerakan pula “Bali yang Binal” oleh Komunitas Pojok dan beberapa komunitas kesenian lainnya. Namun demikian, Kun Adnyana tegas berpandangan bahwa kehadiran Bali Biennale 2005 merupakan sebuah upaya pemetaan pola pemetaan seni rupa Bali ke arah yang lebih meluas, yaitu pada *spirit* Bali terbuka, baik dalam hal tematik-medium ekspresi, akulturasi budaya-bu-daya, maupun sirkuit berbagai etnisitas perupa ([Adnyana, 2007b](#)).

Tahun 2006, diselenggarakan even pameran lukisan tradisional Bali oleh Panitia Bali Bangkit, berlangsung di Gedung CSIS, Jakarta, Museum ARMA, Ubud, dan Kampung Seni Kubu Bingin, Ubud. Pada pengantarnya, Ketua Umum Bali Bangkit Jusuf Wanandi ([Darmawan T., 2006, hal. 3](#)) mengungkapkan bahwa pameran bertajuk “Tradisi dan Reputasi” ini merupakan wujud dari gagasan para pencinta seni rupa Bali untuk terus memelihara dan menyalakan apresiasi atas seni lukis tradisional Bali. Even ini diharapkan dapat melahirkan *spirit* baru bagi dunia seni lukis Bali tradisional.

Dinamika cipta masyarakat seni rupa Bali, khususnya untuk seniman-seniman yang menekuni gaya lukis tradisional, pasca Bali Bangkit, tentu perlu ditelaah secara khusus terutama dalam kaitan kehadirannya sebagai sebuah gerakan sosial (*social movement*) atau sebatas aksi kolektif (*collective action*). Namun mengingat even ini hanya berlangsung sekali (dalam penelusuran yang dilakukan penulis), kiranya belum bisa dilakukan pembacaan secara utuh. Tapi setidaknya salah satu rangkaian even ini diluncurkan buku *Bali Bravo: Leksikon Pelukis Tradisional Bali 200 Tahun*, adalah sebuah upaya mendokumentasikan, mencatat, memetakan, dan menuliskan jejak seni lukis tradisional Bali selama sekian kurun waktu.

Kehadiran organisasi Bali Art Society (BAS) pada tahun 2013 barangkali bisa disebut sebagai salah satu yang paling mendekati wujud gerakan sosial dan advokasi kebijakan seni di Bali. Advokasi kebijakan merupakan serangkaian upaya berupa tuntutan ataupun perlawanan terhadap suatu kebijakan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Advokasi ibarat jembatan yang menghubungkan kepentingan masyarakat dan kebijakan, tujuan utamanya yakni mempengaruhi proses pembentukan kebijakan ([Setyowati dkk., 2021, hal. 6](#))

Adapun latar belakang berdirinya organisasi BAS yakni “Berawal dari gagasan perlunya Bali memiliki Art Project multi facet, yang menjangkau seluruh kemungkinan ekspresi seni rupa di Bali. Dalam diskusi yang dihadiri hampir 50 peserta terdiri dari perupa, penulis, kurator, dan pemilik galeri ini, terungkap potensi Bali baik dari sudut demografi seniman dan geo-budaya; Bali menjadi ruang subur untuk tumbuh dan mekarnya seni rupa global” ([Bali Art Society, 2013a](#)).

Lebih lanjut, kehadiran BAS juga bertolak dari pemikiran bahwa pasca Bali Biennale 2005, sepertinya belum ada lagi even yang mengakomodasi seluruh potensi terkini seni rupa di Bali. Atas dasar itu, para perupa, pencinta seni dan penulis-kurator bertekad membangun gerakan bersama membentuk Bali Art Society (BAS), yang

kemudian dirancang untuk bisa menggelar even besar di setiap tahun ([Metrobali.com, 2013](#)).

Diskusi di awal tahun tersebut kemudian berhasil membentuk tim perumus yang bertugas merumuskan sekaligus merealisasikan gagasan terkait kelahiran Art Project dengan naungan sebuah organisasi yang tertata dan solid. Tim berhasil merumuskan tiga agenda penting yang harus direalisasikan, yakni dipandang perlu untuk mendirikan Bali Art Society, merumuskan statuta untuk organisasi BAS, dan merumuskan *art project* bernama Bali Art Summit.

Melalui musyawarah paripurna (Muspar) perdana, di Art Center, Denpasar pada 15 Februari 2013, ditetapkan susunan pengurus BAS periode 2013-2017, terdiri dari 7 personil Dewan Ketua, yakni AA. Tony Hartawan, Arief B Prasetyo, Wayan Kun Adnyana, Richard Horstman, Made Wiradana, Made Supena, dan Gde Mahendrayasa. Sementara untuk 11 anggota Dewan Pembina dipilih Nyoman Gunarsa, Made Wianta, Chusin Setiadikara, Agung Mangu Putra, Koman Wahyu Neka (Komaneka), Pande Gde Supada, Jean Couteau, Putu Wirata Dwikora, Made Djirna, Agus Maha Usadha dan Warih Wisatsana ([Bali Art Society, 2013b](#)).

Berdasarkan informasi di website Bali Art Society, sekretariat BAS tercatat di Taman Budaya (Art Centre); ini menunjukkan bahwa aktivitas dan program BAS juga mendapat dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Bali.

Meskipun tidak berumur panjang, selama sekian waktu BAS secara rutin mengadakan diskusi publik yang intens, lokakarya, bedah buku, pemutaran film/video, dan lain-lain. Mereka juga mengagendakan sejumlah program lain seperti Menggambar Model, Workshop, Lomba Melukis untuk Siswa, Mural Art Project, Art Camp, Penerbitan dan sebagainya. Termasuk memprakarsai Bali Art Fair dan Bali Art Summit. Bali Art Fair 2013, merupakan *art fair* pertama di Bali, mengusung tajuk *Bali on the Move*. Digelar pada 20 September-20 Oktober 2013 di Tonyraka Art Gallery, Maha Art Gallery, dan Danes Art Veranda.

Di luar beberapa even dan contoh peristiwa yang telah dijabarkan di atas, tentu masih banyak dinamika dan gerakan seni rupa yang dilakukan oleh individu maupun kolektif di Bali. Termasuk pula diskursus melalui esai-esai para pemerhati dan intelektual Bali yang dipublikasikan di media cetak, maupun opini-opini kritis dan seruan protes yang ditumpahkan di ruang-ruang media sosial.

Kepingan-kepingan peristiwa kesenian di Bali, yang karena berbagai situasi dan kondisi sehingga akhirnya tidak berlangsung berkelanjutan atau stagnan, mencerminkan juga kenyataan bahwa perjuangan pada tingkat basis atau akar rumput belum cukup untuk menciptakan ruang apresiasi ideal sebagaimana dicita-citakan. Upaya advokasi lebih lanjut, dan campur tangan suprastruktur atau mereka yang berperan sebagai pengambil dan penentu kebijakan masih diperlukan untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut.

### **Momentum: akselerasi menuju kebijakan seni yang berpihak**

Cendekiawan yang juga seorang diplomat, Soedjatmoko, pernah mengungkapkan bahwa gagasan memiliki kaki untuk bergerak. Dalam sebuah gerakan sosial atau *collective movement*, ini dapat kita artikan bahwa sebuah ide atau gagasan akan terus bergulir dalam berbagai bentuk dan gerakan secara bersama-sama untuk menyerukan cita-cita kolektif atau tujuan yang sama. Sebagaimana pandangan H. Johnston & B. Klandermans (1995), bahwa gerakan sosial (*social movement*) tidak hanya dipengaruhi oleh budaya, tetapi juga membentuk dan mengubah budaya itu

sendiri. Simbol, nilai, makna, ikon, dan keyakinan disesuaikan dengan tujuan gerakan dan sering kali dimasukkan ke dalam budaya yang lebih luas melalui pelembagaan dan pembiasaan.

Dalam konteks formulasi advokasi kebijakan yang terjadi di Bali barangkali berbeda strateginya dengan yang dirumuskan serta dilakukan oleh Koalisi Seni. Hal mana ini karena di Bali belum terdapat kelompok atau koalisi yang secara khusus bergerak untuk memperjuangkan advokasi di bidang kebijakan seni dan budaya ini. Sebaliknya, masing-masing aktor atau agen yang ada di tingkat basis bergerak serentak melalui wacana, program, dan aksi kolektif masing-masing.

Meskipun tidak sepenuhnya dapat diidentifikasi satu per satu, namun dapatlah dikatakan bahwa akumulasi peristiwa, wacana, opini yang hadir melalui berbagai bentuk pada momentum tertentu akan menemukan kanalisasinya; pada saat itulah perjuangan basis mulai masuk atau lebih dekat lagi untuk mengakses *Ideological State Apparatuses* (ISA) di tataran suprastruktur.

Merujuk filsuf Marxis dari Prancis Louis Althusser, struktur masyarakat senantiasa terdiri dari determinan yang spesifik: infrastruktur, atau basis ekonomi yang mencakup kekuatan-kekuatan produktif dan relasi-relasi produksi; dan suprastruktur yang terdiri dari dua tingkat atau unsur, yakni legal-politis (negara dan hukum) serta ideologi. Dalam metafor 'determinasi pada pokok terakhir/determination in the last instance', Althusser mengemukakan bahwa apa yang terjadi di tingkatan basis merupakan penentu akhir dari apa yang terjadi pada tingkat suprastruktur ([Althusser, 2015](#)).

Dari gambaran ini, dapat dirumuskan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang berperan dalam dinamika cipta seni rupa Bali yang lintas masa; 1) peristiwa, menunjuk pada ruang dan faktor kesadaran atau kehendak pelaku sejarah; 2) momentum, merujuk pada waktu yang dikehendaki sejarah; dan 3) sosok yang memiliki kesadaran sejarah, kemudian mengakselerasikan peristiwa dan momentum tersebut menjadi sebuah gerakan.

Bila merunut jejak advokasi kebijakan yang berlangsung di Indonesia, lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali merupakan akumulasi dari berbagai gerakan seni serentak yang terjadi di Bali, kemudian menemukan momentumnya dengan kehadiran pemangku kebijakan dan agensi-agensinya yang memiliki visi keberpihakan terhadap seniman dan memperjuangkan kebudayaan Bali, serta ditetapkannya UU Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan pada tahun 2017.

Setaut itu, terdapat peran dari Wayan Koster yang sejak duduk di Komisi X DPR RI turut menjadi Anggota Panja RUU Pemajuan Kebudayaan, dan kemudian setelah menjabat Gubernur Bali periode 2018-2023 visi perjuangan untuk kebudayaan tersebut dilanjutkannya dengan "Nangun Sat Kerthi Loka Bali".

Setelah pengesahan UU Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah secara gencar melakukan sosialisasi ke daerah-daerah. Pada tahun 2018, digelar Kongres Kebudayaan Bali untuk menuju Kongres Kebudayaan Indonesia 2018. Sejalan itu, Pemerintah Provinsi Bali juga menyusun PPKD atau Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Bali sebagai amanat UU Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan. PPKD ini sekaligus diproyeksikan sebagai pokok-pokok pikiran strategis menuju Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Daerah Provinsi Bali.

Tahapan berikutnya adalah disusunnya Raperda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali dan Naskah Akademiknya. Barulah kemudian pada tanggal 9 Juli 2020, PERDA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali resmi disahkan.

Dalam dinamika menentukan itu, patut pula disinggung peran Prof. Dr. Wayan Kun Adnyana di samping tokoh-tokoh penting lainnya. Hampir pada setiap momentum peristiwa penting yang disebutkan di atas, Kun Adnyana turut ambil bagian di dalamnya; penulisan sejarah Pita Maha, diskursus Mendobrak Hegemoni, Bali Biennale, Bali Bangkit, Bali Art Society, hingga terlibat dalam penyusunan PPKD Provinsi Bali, hingga kemudian dipercaya sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali (2019-2021) dan turut mengakselerasi penyusunan Raperda hingga menjadi PERDA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

PERDA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali terdiri dari 20 Bab dan 81 Pasal ([Rindra, 2020](#)), dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sebagai respons terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global. Penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali menjadi penting dan untuk memperkuat kebudayaan nasional dan mengembalikan Bali sebagai pusat peradaban dunia/Bali Padma Bhuwana.

Adapun terdapat 19 objek penguatan dan pemajuan kebudayaan meliputi: 1) kearifan lokal; 2) ritus; 3) benda sakral; 4) pengetahuan tradisional; 5) teknologi tradisional; 6) pengobatan tradisional; 7) tradisi lisan; 8) manuskrip; 9) situs; 10) adat istiadat; 11) seni; 12) arsitektur tradisional; 13) bahasa dan aksara; 14) permainan rakyat; 15) olahraga tradisional; 16) kerajinan; 17) desain; 18) busana; dan 19) boga ([Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali, 2020](#)). Ini lebih banyak dari isi dalam UU Pemajuan Kebudayaan No 5 Tahun 2017 yang hanya merangkum 10 objek pemajuan kebudayaan.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a) objek penguatan dan pemajuan kebudayaan; b) penguatan dan pemajuan; c) tugas dan wewenang; d) Majelis Kebudayaan Bali; e) ekosistem kebudayaan; f) apresiasi budaya; g) Pesta Kesenian Bali; h) Jantra Tradisi Bali; i) Festival Seni Bali Jani; j) Perayaan Kebudayaan Dunia; k) penghargaan; l) peran aktif masyarakat; m) sarana dan prasarana; n) pendanaan; dan o) sanksi.

Sebagai salah satu dampak dari pemberlakuan PERDA Nomor 4 Tahun 2020 adalah ternaunginya berbagai aspek kebudayaan Bali. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1): “Objek penguatan dan pemajuan kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama penguatan dan pemajuan kebudayaan.”

Perihal ekosistem kebudayaan termaktub pula dalam PERDA Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 35 ayat (1), berbunyi: “Ekosistem kebudayaan merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap komponen Kebudayaan Bali dalam hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.”

Lebih lanjut, pada ayat (2) disuratkan: “Komponen Kebudayaan Bali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pranata kebudayaan; b. pelaku kebudayaan; c. lembaga kebudayaan; d. sarana dan prasarana kebudayaan; dan e. kegiatan kebudayaan.”

Sejalan itu, pada Pasal 39 secara khusus diatur perihal Pesta Kesenian Bali (PKB) yang “merupakan penguatan dan pemajuan kesenian tradisional, kesenian

klasik, dan kesenian rakyat” (ayat (1)), dan diterakan pula secara jelas mengenai ruang lingkup aktivitas PKB yakni pada ayat (2) butir e, yakni Kandarupa (pameran).

Dengan ditetapkannya PERDA Nomor 4 Tahun 2020 dan tersuratkannya poin Kandarupa (pameran) secara resmi dalam regulasi tersebut menegaskan bahwa kegiatan Bali Kandarupa wajib untuk diselenggarakan. Kecuali, apabila dalam hal keadaan darurat, sebagaimana tersurat dalam Pasal 79 ayat (1), penyelenggaraan PKB dapat ditunda atau ditiadakan (semisal sewaktu pandemi Covid-19, PKB tahun 2020 tidak terselenggara).

## **SIMPULAN**

Meskipun konsep mengenai determinasi sejarah masih mengandung perdebatan, karena sebagian pihak menyakini bahwa prinsip ini seakan mengabaikan kehendak bebas, di mana segala peristiwa yang terjadi merupakan kehendak takdir (kuasa yang lebih besar dari manusia); namun, dalam konteks bahasan ini, antara kehendak pelaku sejarah dan kehendak sejarah menemukan irisannya melalui sebuah momentum. Melalui pertautan antara berbagai peristiwa kunci pada periode waktu tertentu dan bingkai peristiwa kebudayaan yang lebih besar dapat dirumuskan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) unsur yang berperan dalam dinamika cipta seni rupa Bali yang lintas masa; 1) peristiwa, menunjuk pada ruang dan faktor kesadaran atau kehendak pelaku sejarah; 2) momentum, menunjuk pada waktu yang dikehendaki sejarah; dan 3) sosok yang memiliki kesadaran sejarah, kemudian mengakselerasikan peristiwa dan momentum tersebut menjadi sebuah gerakan.

Becermin dari dinamika cipta dan praktik seni yang berlangsung selama ini, sebuah peristiwa atau aksi kolektif seni yang terjadi di sana sini di Bali, di berbagai ajang dan kesempatan, masing-masing masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berakselerasi menjadi gerakan sosial yang bertumbuh bersama. Untuk bisa disebut sebagai sebuah gerakan sosial—dan bukan semata kerumunan atau perilaku kolektif yang bersifat spontan—maka sebuah aksi bersama setidaknya haruslah memenuhi unsur; terorganisir, berkelanjutan, sistematis, dilakukan melalui strategi yang terstruktur, dan memiliki tujuan jangka panjang.

Kendati hanya berlangsung beberapa tahun, namun organisasi Bali Art Society (BAS) telah mencoba upaya hadir sebagai sebuah gerakan yang terorganisir dan memiliki visi untuk masa depan—hal mana dapat kita sandingkan sebagian dengan gerakan sosial Pita Maha tahun 1936. Dalam formulasi kehadirannya yang berbeda, Bali Kandarupa, sebagai sebuah ajang pameran tahunan yang tertata dan dikelola dengan manajemen lebih profesional, diproyeksikan sebagai sebuah ruang sosial sekaligus gerakan yang didedikasikan penuh untuk memperjuangkan seni rupa klasik dan tradisi Bali. Apakah di masa mendatang even Bali Kandarupa akan terus konsisten berjalan dengan kuratorialnya yang tertata, terarah, dan visioner, berikut tata kelola profesional, akan ditentukan lagi oleh periode dan momentum sejarahnya; siapa pelaku dan pelanjut sejarah, bagaimana regulasi, serta apa visi pemangku kebijakan (suprastruktur).

Keberadaan PERDA Nomor 4 Tahun Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali boleh saja dianggap sebagai “produk” politik pemerintah yang sedang berkuasa, namun dalam kenyataannya kehadiran regulasi ini juga merupakan isyarat dari sebuah kebijakan seni budaya yang mencoba berpihak kepada seniman dan kesenian. Bila dirunut kembali jejaknya, kelahiran PERDA ini merupakan akumulasi berbagai peristiwa seni, diskusi di forum-forum, juga gerakan sosial yang serentak terjadi di Bali selama sekian periode waktu, kemudian

menemukan momentumnya melalui kehadiran pemangku kebijakan, dan agensi-agensi yang memiliki keselarasan visi keberpihakan terhadap seniman dan memperjuangkan kebudayaan Bali, seturut ditetapkannya UU Nomor 5 tentang Pemajuan Kebudayaan pada tahun 2017.

Pada tataran yang lebih jauh di masa mendatang, sudah seyogianya pula masyarakat seni Bali memiliki organisasi atau perhimpunan untuk mengakumulasikan ide-ide, gagasan, dan menyuarakan gerakan advokasi seni budaya. Tiba saatnya segala akumulasi dari berbagai aksi kolektif (*collective action*) selama ini bertransformasi menjadi gerakan social (*social movement*) yang lebih tertata dan terarah, sehingga memberikan dampak lebih signifikan bagi ekosistem seni budaya Bali yang sehat dan berkelanjutan. Semakin banyak kelompok atau gerakan yang memperjuangkan advokasi sebagaimana dilakukan Koalisi Seni Indonesia, tentu akan semakin mendorong terciptanya iklim berkesenian yang lebih baik dan kebijakan seni yang berpihak kepada seniman.

### DAFTAR RUJUKAN

- Adnyana, W. K. (2007a). *Nalar Rupa Perupa*. Arti Foundation.
- Adnyana, W. K. (2007b, September 30). Tiga Peta Seni Lukis Bali. *KOMPAS*.
- Adnyana, W. K. (2018). *Pita Maha: Gerakan Sosial Seni Lukis Bali 1930-an*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Adnyana, W. K., Couteau, J., & Muka, K. (2023). *Prabangkara Sagara Prasiddha: Citra Paripurna Samudra Mahotama*. Bali Kandarupa.
- Adnyana, W. K., Muka, K., & Wisatsana, W. (2021). *Wana Jnana: Wanda, Rimba dan Spritualitas: Katalog Pameran Bali Kandarupa 2021*. Bali Kandarupa.
- Adnyana, W. K., Muka, K., & Wisatsana, W. (2024). *Charma Manu Candika: Sastra Rupa Karaman Artistika*. Bali Kandarupa.
- Adnyana, W. K., Rai, A. A., & Wisatsana, W. (2022). *Danu Hulu Manu: Susastra Lelaku Air Cipta Rupa*. Bali Kandarupa.
- Althusser, L. (2015). *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara (Catatan-Catatan Investigasi)*. IndoPROGRESS.
- Arcana, P. F. (2022). *Buah Ketekunan Profesor Kun*. *KOMPAS*.  
<https://www.kompas.id/baca/figur/2022/02/26/buah-ketekunan-profesor-kun>
- Bali Art Society. (2013a). *Bali Art Society*.  
<https://baliartsociety.wordpress.com/bali-art-society-bas/>
- Bali Art Society. (2013b). *Inilah Pengurus Baru Bali Art Society*.  
<https://baliartsociety.wordpress.com/2013/05/09/inilah-pengurus-baru-bali-art-society/>
- Darmawan T., A. (2006). *Tradisi dan Reputasi: Pameran Lukisan Rradisional Bali 100 Tahun*. Bali Bangkit.
- Dwikora, P. W. (2005). *Space & Scape: Katalog Pre Bali Biennale 2005*. Bali Biennale.
- Dwikora, P. W. (2020). *Bali Nyala Api Seni Membaca Seni Rupa dari Bali Biennale 2005*. Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
- Johnston, H. (1995). *Social Movements and Culture* (H. Johnston & B. Klandermans (ed.)). University of Minnesota Press.
- Komang Sudirga, Hendra Santosa, D. K. (2015). Jejak Karawitan Dalam Kakawin Arjuna Wiwaha : *Segara Widya*, 3(1), 471–481.
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah* (Edisi Kedu). Tiara Wacana Jogja.
- Kuntowijoyo. (2008). *Penjelasan Sejarah*. Tiara Wacana Jogja.

- Lailatusyarifah, N. Y. (2021). Free Will dan Determinisme: Justifikasi Terhadap Definitional Compatibilism. *Universitas Indonesia*, 2006585872, 1–12.
- Metrobali.com. (2013). *Banjar Baru Seni Rupa Bali : Besok, Musyawarah Pembentukan BAS di Tony Raka Gallery, Ubud*. Metrobali.com. [https://metroballi.com/banjar-baru-seni-rupa-bali-besok-musyawah-pembentukan-bas-di-tony-raka-gallery-ubud/#google\\_vignette](https://metroballi.com/banjar-baru-seni-rupa-bali-besok-musyawah-pembentukan-bas-di-tony-raka-gallery-ubud/#google_vignette)
- Pandjaja, I. B. (1997). *Pesta Kesenian Bali* (II.Ed). NV. Percetakan Bali.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali (2020).
- Pesta Kesenian Bali. (1979). *Katalog Pameran Pesta Kesenian Bali*. -.
- Picard, M. (2006). *Bali: pariwisata budaya dan budaya pariwisata*. Kepustakaan Populer Gramedia, Forum Jakarta-Paris. <http://books.google.com/books?id=uwPuIPTuqNMC&pgis=1>
- Putra, N. D. (1994). Pesta Kesenian Bali Seribu Tahun Lagi. *Bali Post*.
- Putra, N. D. (2008). *Bali dalam Kuasa Politik*. Arti Foundation.
- Rindra, D. (2020). *Perda No.4 Tahun 2020 Atur 19 Objek Penguatan dan Pemajuan Budaya Bali*. Balipost.com. <https://www.balipost.com/news/2020/07/16/136443/Perda-No.-4-Tahun-2020...html>
- Setyowati, E., Nursyamsi, F., Argama, R., Rofiandri, R., Safira, R., Ninditya, R., & Gumay, H. (2021). *Belajar Advokasi Kebijakan Seni - Metode* (N. Andarnuswari (ed.)). Koalisi Seni.
- Suryawan, I. N. (2001, April 1). Menuju Gerakan Seni Rupa Baru Bali: Membongkar Hegemoni Moral dan Kultural Seni Rupa. *KOMPAS*.
- Suryawan, I. N. (2009). *Bali Pascakolonial: Jejak Kekerasan dan Sikap Kajian Budaya*. Kepel Press.
- Suryawan, I. N. (2019). *Kritik Kebudayaan (Kesenian) Bali yang Involutif*. Bale Bengong. <https://balebengong.id/bali-yang-involutif/>
- Suryawan, I. N. (2020). *Saru Gemeng Bali: Sepilihan Esai Kritik Kebudayaan*. Pustaka Larasan.
- Wija, I. N. (2013). *Pesta Kesenian Bali, Pesta Media Massa*. Pustaka Larasan.